



Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan Islam

Syamsurizal^{1,*}, Oktavia Dewi Afja², Iswantir³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Bukittinggi, Indonesia

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:

Submit : 12 November 2022
 Direvisi : 23 November 2022
 Diterima : 22 Desember 2022
 Diterbitkan : 30 Desember 2022

Kata Kunci

Manajemen, Keuangan, Lembaga Pendidikan

Koresponden

E-mail: syamsurizal.uinbkt@gmail.com

A B S T R A K

Untuk mencapai kesejahteraan keuangan diperlukan pengetahuan dan implementasi atas praktik keuangan yang sehat, idealnya perlu dimiliki dan diterapkan dalam kehidupan oleh setiap orang maupun lembaga. Pengelolaan keuangan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua sekolah. Hanya kadar substansi pelaksanaannya yang beragam antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Pada sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah, pengelolaan keuangannya pun masih sederhana. Namun yang terpenting adalah apakah lembaga pendidikan tersebut sudah memaksimalkan manajemen keuangannya berdasarkan prinsip-prinsip keuangan yang seharusnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip manajemen keuangan dilembaga pendidikan islam dan bagaimana manajemen keuangan di lembaga pendidikan islam. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan *library research*, hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah dalam menjalankan rencana anggaran sudah berjalan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa rencana kegiatan yang terealisasi sesuai dengan harapan yaitu transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip manajemen keuangan.

Abstract

To achieve practical financial well-being requires knowledge and application of sound finance, ideally it needs to be owned and applied in life by every person and institution. Financial management in general has actually been carried out well by all schools. Only the substance level of implementation varies from one school to another. In ordinary schools, where the community's carrying capacity is still relatively low, financial management is still simple. However, the most important thing is whether the educational institution has maximized its financial management based on proper financial principles. The purpose of this study is to find out the principles of financial management in Islamic educational institutions and how financial management is in Islamic educational institutions. The research method used is qualitative with a library research approach, the results show that the school's financial management in carrying out the budget plan has been going very well. This is indicated by several activity plans that are realized in line with expectations, namely transparency, accountability, effectiveness and efficiency in accordance with financial management principles.

This is an open access article under the CC-BY-SA license



1. Pendahuluan

Pendidikan ialah suatu proses penciptaan kepribadian supaya peserta didik mempunyai karakter yang mantap serta mandiri. Suatu pendidikan akan sukses dengan baik manakala ditopang oleh tenaga pendidik serta tenaga kependidikan yang handal dan didukung oleh fasilitas serta prasarana belajar yang mencukupi. Karena itu kecukupan pendanaan (keuangan) merupakan sesuatu keniscayaan manakala menginginkan pendidikan yang bermutu. Tetapi banyaknya sumber pendanaan tidak jadi jaminan mutu pendidikan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu manajemen keuangan pendidikan butuh dikelola dengan baik sehingga dengan pendanaan yang

dimiliki sanggup memberdayakan warga kampus, sekolah serta lembaga pendidikan yang lain dalam menggapai tujuan pendidikan.

Manajemen keuangan menuntut keahlian pengelola dalam melaksanakan perencanaan, penerapan dan penilaian dalam hal keuangan. Di sisi lain, lembaga dituntut agar sanggup mempertanggungjawabkan keuangan secara transparan serta akuntabel sehingga dibutuhkan internalisasi nilai-nilai Islam yang kuat (Usman, 2016). Pengelolaan Pendidikan Islam, tidak bisa terlepas dari nilai-nilai Islam yang mendasari penyelenggaraannya. Nilai-nilai Islam memiliki ruh serta semangat dalam menyelenggarakan manajemen pendidikan yang jujur, amanah, serta bertanggungjawab.

Mujammil Qomar mengemukakan bahwa keuangan merupakan segalanya dalam memajukan sesuatu lembaga pendidikan Kalau tidak didukung dengan finansial yang memadai, manajer lembaga pendidikan tidak dapat berbuat banyak dalam upaya memajukan lembaga pendidikan yang di pimpinnya (Qomar, 2007). Dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 pasal 46 ayat 1 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat. Berikutnya pada pasal 49 ayat 3 dinyatakan bahwa dana pendidikan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam wujud hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketersediaan dana yang memadai bila tidak dikelola dengan baik, hingga tidak mustahil pemborosan, ketidak sesuaian belanja dengan rencana apalagi penyelewengan dana dapat saja terjadi, maka perencanaan yang baik, harus mempunyai kesesuaian belanja sekolah dengan rencana, pengawasan serta pertanggung jawaban perlu di manajemen dengan baik. Maka, dalam jurnal ini akan dibahas lebih lanjut berkaitan dengan konsep manajemen keuangan, ruang lingkup manajemen keuangan serta sumber-sumber keuangan lembaga pendidikan.

2. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research, sementara jika dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang berfokus pada penjelasan sistematis terhadap fakta yang diperoleh. Sementara data yang dikumpulkan bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Kriteria sumber data yang digunakan antara lain buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian baik itu dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

3. Pembahasan

3.1. Pengertian Manajemen Keuangan Pendidikan

Manajemen keuangan pendidikan adalah merupakan beberapa aktivitas yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan sampai pertanggung jawaban keuangan dengan harapan tercapainya tujuan pendidikan secara efisien serta efektif. Berdasarkan pendapat Nanang Fattah pembiayaan pendidikan merupakan sejumlah uang yang dihasilkan serta dimanfaatkan buat membiayai kebutuhan pendidikan semacam pendapatan guru, pengadaan fasilitas serta prasarana, peningkatan profesionalitas guru, aktivitas ekstrakurikuler, aktivitas supervisi pendidikan serta lain-lain (Mulyono, 2016).

Sedangkan menurut Sulistiyorini memaknai manajemen keuangan dalam makna kecil yang berarti pembukuan. Sedangkan dalam makna luas manajemen keuangan berarti pengurusan serta pertanggung jawaban dalam memakai keuangan baik kepada warga masyarakat, pemerintah wilayah ataupun kepada pemerintah pusat, diawali dari perencanaan, pengorganisasian, penerapan hingga pengawasan serta pertanggung jawaban keuangan (Sulistiyorini, 2006). Seiring dengan

Sulistiyorini, David Wijaya mengatakan manajemen keuangan sekolah merupakan serangkaian aktivitas mengendalikan keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, serta pertanggung jawaban keuangan sekolah (Wijaya, 2009).

Berikutnya pendapat Agustinus menyebutkan bahwa kegunaan manajemen keuangan pendidikan mempunyai arti yang lebih luas yaitu: menyediakan data kuantitatif yang bisa digunakan bagi dasar pertimbangan untuk pemangku kepentingan yang sejalan dengan kedudukannya masing-masing:

- a. Kepala Sekolah: informasi keuangan sekolah hendak dijadikan untuk landasan kepala sekolah guna menyusun rencana kegiatan sekolah, mengevaluasi kemajuan dan melaksanakan upaya korektif yang dibutuhkan.
- b. Guru serta Karyawan: informasi keuangan sekolah berfungsi untuk acuan terhadap pengenalan keahlian atau kemampuan sekolah dalam membagikan imbal jasa, serta kesempatan kerja.
- c. Orang tua siswa: berguna untuk orang tua siswa buat mengenali kelangsungan hidup sekolah, perjanjian jangka panjang sekolah serta tingkatan ketergantungan sekolah.
- d. Pemasok (Supplier): merupakan bahan untuk mengenali kemungkinan jumlah utang yang dimiliki sekolah.
- e. Pemerintah: sebagai pengendali kegiatan sekolah serta menetapkan anggaran buat tahun selanjutnya.
- f. Masyarakat: sebagai penyedia informasi terhadap pengelolaan keuangan sekolah dan rangkaian kegiatan sekolah (Hermino, 2013).

Sedangkan pendapat Sulistiyorini, Fokus manajemen keuangan pendidikan adalah memfungsikan serta memaksimalkan keahlian menyusun rencana anggaran sekolah, mengelola sekolah bersumber pada rencana serta anggaran tersebut serta memfungsikan masyarakat agar ikut serta secara aktif berpartisipasi mengelola sekolah (Sagala, 2010).

3.2. Ruang Lingkup Manajemen Keuangan Pendidikan

3.2.1. Budgeting (Penyusunan ataupun Perencanaan Anggaran)

Dalam penataan anggaran pengelola keuangan butuh mencermati sumber-sumber keuangan yang terdapat baik itu bersumberkan dari orang tua murid, komite, masyarakat ataupun pemerintah, baik itu pemerintah wilayah ataupun pemerintah pusat. Tidak hanya itu, pengelola keuangan juga harus mencermati prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Hemat, berdasarkan kebutuhan.
- b. Terarah serta terkontrol sesuai dengan rencana.
- c. Tidak diperbolehkan memakai dana buat keperluan di luar keperluan aktivitas belajar serta mengajar.

3.2.2. Accounting (Pembukuan)

Accounting dalam manajemen keuangan pendidikan meliputi 2 prinsip:

Pertama, pengurusan menyangkut kewenangan yang memastikan kebijakan menerima serta mengeluarkan uang. Kepengurusan ini sering juga disebut dengan istilah Tata Usaha.

Kedua, kepengurusan yang menindak lanjuti urusan yang pertama yaitu menerima, menyimpan serta mengeluarkan uang dalam pengelolaan keuangan, semestinya kepala sekolah membagikan arahan kepada staf yang diberikan tugas untuk mengelola keuangan sekolah.

3.2.3. Auditing (Pemeriksaan)

Pengecekan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, serta pembayaran ataupun penyerahan uang yang dilakukan oleh bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang.

3.2.4. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan pelaporan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada internal lembaga ataupun eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan.

3.3. Sumber-sumber Keuangan Pendidikan

Di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46 ayat 1 dinyatakan kalau pendanaan pendidikan jadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah wilayah serta warga masyarakat. Hal senada juga disebutkan oleh Sulistiyorini secara garis besar sumber keuangan pendidikan bisa dikelompokkan menjadi 6 kelompok :

3.3.1. Pemerintah: Pemerintah Pusat, Pemerintah Wilayah

Sumber keuangan dari pemerintah disediakan lewat Anggaran Rutin dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang dialokasikan kepada seluruh sekolah pada tiap tahun ajaran. Dana ini secara umum disebut dengan dana rutin. Dana dikeluarkan bersumber pada jumlah peserta didik kelas I, II, serta III. Mata anggaran serta besarnya dana untuk jenis pengeluaran telah ditetapkan Pemerintah di dalam DIK. Pengeluaran serta pertanggung jawaban atas pemanfaatan dana rutin, harus benar-benar cocok dengan anggaran tersebut. Selain anggaran rutin pendanaan dari pemerintah dapat juga diberikan kepada tiap sekolah berbentuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan secara berkala selaku upaya pemerintah menolong pembiayaan operasional sekolah.

3.3.2. Orang Tua Siswa (peserta didik)

Pendanaan dari orang tua peserta didik disebut juga dengan pendanaan dari masyarakat yang sifatnya mengikat. Dengan kata lain disebut juga dengan sebutan iuran komite yang besarnya ditetapkan lewat rapat komite. Dana komite dibedakan menjadi 3 jenis yaitu:

- a. Dana Tetap Bulanan. Merupakan dana yang harus dibayar setiap bulan selama menjadi peserta didik.
- b. Dana Insidentil ialah dana yang diharuskan kepada peserta didik baru.
- c. Dana Sukarela ialah dana yang diberikan secara suka rela oleh peserta didik ataupun orang tua peserta didik.

3.3.3. Masyarakat, baik yang sifatnya mengikat ataupun tidak mengikat.

Pendanaan pendidikan dalam jenis ini ialah pendanaan dari warga yang sifatnya suka rela baik secara individu ataupun kelompok.

3.3.4. Dana Alumni

Dana alumni merupakan pendanaan yang diterima dari para alumni yang mempunyai kepedulian terhadap kualitas lembaga pendidikan. Bentuk bantuan dari para alumni tidak cuma terbatas dalam wujud uang tetapi bisa pula berbentuk bantuan peralatan sekolah ataupun wujud tenaga semacam dedikasi diri buat mengajar selaku wujud rasa syukur serta terimakasih kepada lembaga pendidikan sebab telah membagikan ilmunya serta selaku wujud pembekalan diri terhadap dunianya yang baru terjun dalam dunia pendidikan. Dana ini bisa diterima dari alumni yang diberikan secara langsung oleh orang ataupun kelompok baik lewat kegiatan perkumpulan para alumni ataupun lustrum sekolah.

3.3.5. Dana Peserta Kegiatan

Dana dari peserta kegiatan merupakan pendanaan yang bersumberkan dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah, pendanaan ini dapat bersumber dari peserta didik, guru, ataupun warga bergantung wujud kegiatan yang diselenggarakan. Semacam aktivitas yang diperuntukkan sebagai penunjang kompetensi guru yang dilaksanakan secara mandiri oleh sekolah serta pendanaannya melibatkan guru, ataupun aktivitas ekstrakuler yang diberikan kepada peserta didik buat pengembangan diri yang sesuai dengan bidang yang diinginkan.

3.3.6. Dana Kegiatan Kewirausahaan Sekolah

Banyak sekolah-sekolah sekarang ini yang meningkatkan usaha buat tingkatkan keberdayaan sekolah dalam aspek pembiayaan. Kewirausahaan sekolah bisa dibesarkan dengan mengaitkan masyarakat sekolah sendiri semacam peserta didik ataupun guru, serta staf ataupun dengan memberdayakan warga masyarakatsekitar. Semacam koperasi, kantin, fotokopi, bazar tahunan, perkebunan, toko serba terdapat serta lain-lain.

3.4. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Pendidikan

3.4.1. Transparansi

Transparansi maksudnya adalah keterbukaan. Transparansi dalam manajemen keuangan pendidikan berarti terdapatnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan mulai dari sumber-sumber keuangan, pemanfaatan sampai pertanggung jawaban keuangan pendidikan. Transparansi keuangan sangat dibutuhkan untuk pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi juga sangat berguna buat peningkatan partisipasi orang tua, warga serta pemerintah dalam penyelenggaraan program pendidikan. Tidak hanya itu transparansi hendaknya juga sebagai bentuk peningkatan keyakinan antar orang tua, masyarakat, pemerintah serta pemerintah wilayah melalui kemudahan dalam mengakses informasi-informasi keuangan pendidikan.

3.4.2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan keadaan seorang yang dinilai oleh orang lain sebab mutu performansinya dalam menuntaskan tugas buat menggapai tujuan yang jadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan pendidikan berarti pemakaian keuangan pendidikan bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan.

3.4.3. Efektivitas

Efektifitas merupakan ketercapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Manajemen keuangan bisa dikatakan memenuhi prinsip efektifitas manakala aktivitas yang diselenggarakan sanggup mengendalikan keuangan untuk membiayai kegiatan dalam rangka menggapai tujuan lembaga yang sudah ditetapkan serta mutu outcomes nya juga sesuai dengan rencana.

3.4.4. Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan terbaik antara masukan (*input*) serta keluaran (*output*) ataupun antara daya serta hasil. Daya yang diartikan berupa fikiran, waktu, serta biaya. Dilihat dari segi penggunaan daya, penyelenggaraan aktivitas pendidikan bisa dikatakan efektif manakala sanggup menggunakan waktu, tenaga serta biaya yang sekecil-kecilnya tetapi bisa menggapai tujuan yang sudah direncanakan.

3.5. Tugas Pengelola Keuangan

Tugas pengelola keuangan berdasarkan pendapat Djoened Rastavara dalam penerapan manajemen keuangan menganut asas pemisahan tugas, yaitu *otorisator ordonator* dan bendaharawan. *Otorisator* merupakan pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil kebijakan yang menyebabkan penerimaan serta pengeluaran anggaran. *Ordonator* merupakan pejabat yang berwenang melaksanakan pengujian serta memerintahkan pembayaran atas seluruh tindakan yang dilakukan berdasarkan pada otorisasi yang sudah ditetapkan Bendaharawan merupakan pejabat yang

berwenang melaksanakan penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran uang dan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perhitungan serta pertanggung jawaban.

Kepala sekolah selaku pemimpin di sekolah mempunyai fungsi selaku otorisator serta dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Kepala sekolah tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendahara sebab kepala sekolah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengawasan ke dalam. Manajer keuangan sekolah mempunyai tugas untuk menentukan keuangan sekolah mulai dari metode memperoleh dana, sampai pemanfaatan dana.

3.6. Proses Pengelola Keuangan

3.6.1. Perencanaan Anggaran

Penganggaran terhadap fasilitas serta prasarana pendidikan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan keberlangsungan proses belajar serta mengajar ialah perihal yang berarti untuk dilakukan sebagai gapaian tujuan penyelenggaraan pendidikan. Anggaran ialah rencana kuantitatif terhadap operasi sekolah, karenanya penganggaran tidak cuma terbatas pada aspek keuangan, anggaran juga bisa berbentuk *non* keuangan dari rencana operasional yang sudah ditetapkan.

Proses penyiapan anggaran dapat disebut dengan penganggaran ialah aktivitas menyediakan anggaran buat melakukan program yang sudah direncanakan. Berdasarkan pendapat Terry dalam Syarifudin mengutarakan bahwa perencanaan merupakan menetapkan pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh kelompok untuk menggapai tujuan yang direncanakan. Perencanaan mencakup pengambilan keputusan sebab termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan (Syafaruddin, 2005).

Dari penjelasan ayat diatas bisa pula dimengerti kalau dalam manajemen keuangan pendidikan perencanaan yang baik merupakan sesuatu keniscayaan manakala menginginkan keberlangsungan serta kelancaran penerapan aktivitas pendidikan, lebih-lebih di masa teknologi seperti sekarang ini dimana seorang pendidik bukan lagi merupakan satu-satunya sumber belajar peserta didik, pertumbuhan pendidikan yang dinamis menuntut semua pelaku pendidikan agar meningkatkan mutu pendidikan supaya senantiasa *survive* di tengah-tengah persaingan yang terus menjadi berat. Tetapi bila direncanakan dengan baik seluruh ujian akan terasa ringan sebab telah disiapkan dengan baik.

3.6.2. Strategi Mencari Sumber Dana Sekolah.

Guna menunjang keberlangsungan aktivitas pendidikan di sekolah, kepala sekolah dituntut supaya bisa menggali sumber-sumber pembiayaan, dengan pendanaan yang dimiliki kepala sekolah bersama-sama dengan stakeholder bisa prediksi sasaran serta tujuan yang hendak di capai. Beberapa strategi buat menggali sumber pendanaan sekolah antara lain adalah:

a) Membuat Koperasi

Koperasi adalah salah satu usaha yang banyak diminati oleh sekolah, baik sekolah negeri ataupun swasta. Pengembangan usaha koperasi dinilai sangat strategis buat menggali sumber pembiayaan sekolah, sebab tidak cuma terbatas pada penyediaan benda yang berbentuk penyediaan peralatan sekolah siswa saja, tetapi lebih luas dari itu seperti toko serba ada, Foto copy, laundry, dan lain sebagainya. Dengan pengelolaan dan manajemen yang pas tidak mustahil sekolah sanggup mandiri secara financial apalagi sanggup memberdayakan warga sekitar.

b) Membuka Kursus

Membuat kegiatan yang berbentuk layanan kursus adalah salah satu upaya yang diselenggarakan sekolah guna menggali sumber-sumber pendanaan sekolah. Kursus ini terbuka untuk umum dan tidak diharuskan terhadap siswa.

c) Pengajuan proposal kepada pemerintah daerah serta pihak swasta.

Pengajuan proposal kepada pemerintah daerah ataupun swasta ialah salah satu usaha kepala sekolah guna memperoleh dorongan dana. Tetapi pengajuan dana kepada pemerintah daerah serta swasta ini tidak selalu dilakukan namun pada saat dan waktu tertentu.

d) Penggalangan dana dari para donatur.

Sumber pendanaan lain yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah adalah berupa pendanaan yang bersumberkan dari para donatur, baik itu donatur bersifat tetap maupun tidak tetap.

e) Penggalangan dana dari para alumni.

Penggalangan dana dari para alumni yang telah berhasil dapat jadi salah satu bentuk usaha sekolah supaya keberlangsungan sekolah dapat selalu survive.

f) Dana orang tua siswa.

Sumber pembiayaan dari orang tua siswa bisa berbentuk Sumbangan Pelaksanaan Pendidikan (SPP), Bantuan Pengembangan Pendidikan (BPP), biaya registrasi murid baru, iuran ekstrakurikuler, iuran perpustakaan, dan bantuan-bantuan lain yang ditetapkan sekolah.

3.6.3. Penggunaan Keuangan Sekolah

Dana yang sudah dikumpulkan, kemudian dibukukan serta diagendakan untuk dipergunakan sebagai pendukung keberlangsungan aktivitas pendidikan di sekolah. Dalam memakai dana sekolah, pengelola keuangan dituntut supaya bisa berpegang teguh pada prinsip-prinsip manajemen seperti hemat dalam mempergunakan dana dan sesuai dengan rencana serta program yang sudah ditetapkan sekolah.

Widjanarko, M dan Suhertian, P.A menyebutkan, staf yang menjadi pengelola keuangan sekolah dituntut supaya menguasai tugasnya sebagai berikut: pembukuan, mempunyai pengabdian yang besar terhadap tugas serta pimpinan, menguasai kalau bertugas dibidang keuangan merupakan pelayanan, tanggap terhadap tugas, karena jika kurang tanggap dalam bekerja akan berakibat mengurangi kelancaran pencapaian tujuan (Komariah, 2018).

3.6.4. Pengawasan serta Evaluasi Anggaran.

Pengawasan anggaran merupakan beberapa kegiatan yang tersusun secara sistemik serta sistematis yang dimulai dari aktivitas memonitor, memeriksa, menilai serta melaporkan penggunaan anggaran yang dialokasikan buat membiayai program-program pendidikan supaya anggaran tersebut digunakan sebagaimana mestinya serta bisa dilaksanakan secara efisien serta efektif.

Pengawasan dilaksanakan oleh kepala sekolah sebagai manager sekolah guna menjamin ketetapan penerapan tugas sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan, menghindari pemborosan serta penyelewengan dana, menjamin kepuasan dan tingkatkan keyakinan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan sekolah.

Langkah-langkah pengawasan menurut Komaruddin adalah selaku berikut:

- a) Pengembangan Standar. Pengawasan diawali dengan meningkatkan batas ataupun rincian strategi khusus dan praktis sebagai acuan penerapan pengawasan.
- b) Pengukuran Penerapan, merupakan kegiatan-kegiatan berbentuk pengumpulan data tentang aktivitas ataupun program yang sedang berlangsung dengan merujuk pada perencanaan yang sudah ditetapkan.
- c) Penilaian Pelaksanaan, merupakan kegiatan menentukan makna terhadap kemungkinan adanya penyimpangan ataupun pelanggaran terhadap keuangan sekolah.

d) Perbaikan, yaitu merupakan aktivitas yang mengupayakan penyesuaian-penyesuaian atas perbedaan ataupun penyimpangan yang sudah terjalin (Aedi, 2014).

3.6.5. Pertanggungjawaban Pemakaian Keuangan Sekolah

Pertanggungjawaban pemakaian keuangan sekolah merupakan suatu laporan keuangan dari keseluruhan pembiayaan aktivitas sekolah. Laporan dilakukan oleh bendahara. Laporan keuangan berisikan tentang pendapatan, pengeluaran serta penggunaan anggaran. Dalam dunia pendidikan keuangan dan pembiayaan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, semakin baik keadaan keuangan sekolah maka semakin baik pula kemampuan sekolah dalam mendanai keperluan sekolah. sebaliknya, sekolah yang tidak mempunyai keuangan yang memadai, maka sekolah tidak akan sanggup mendanai aktivitas sekolah.

4. Kesimpulan

Manajemen keuangan sekolah adalah merupakan salah satu substansi sekolah yang ikut memastikan keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Manajemen keuangan sekolah bisa dimaknai sebagai upaya kepengurusan ataupun ketatausahaan keuangan mulai dari pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Dengan manajemen yang baik, sekolah tidak hanya sanggup mendanai pembiayaan sekolah, tetapi sekolah juga mampu meningkatkan prestasi sekolah, meningkatkan keberdayaan guru serta tenaga kependidikan dalam melakukan tugasnya.

Dengan manajemen yang baik pula tidak mustahil untuk sekolah mempunyai kemandirian pendanaan, bisa memberdayakan masyarakat sekolah serta warga masyarakat sekelilingnya. Untuk itu dalam pelaksanaannya, kepala sekolah, bendahara serta staf dituntut untuk tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Manajemen keuangan, yaitu: transparan, akuntabilitas, efektif dan efisien.

Tidak hanya itu pengelola keuangan juga dituntut agar bisa menguasai ruang lingkup manajemen keuangan sekolah, meliputi perencanaan anggaran, mencari sumber dana sekolah, penggunaan keuangan sekolah, pengawasan serta penilaian anggaran serta pertanggungjawaban Keuangan Sekolah.

Daftar Pustaka

- Aedi, N. (2014). *Pengawasan Pendidikan*. Rajawali Pres.
- Hermiono, A. (2013). *Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan: Tinjauan perilaku organisasi menuju Comprehensive Multilevel Planning*. Gramedia.
- Komariah, N. (2018). Konsep Manajemen Keuangan. *Manajemen Keuangan Pendidikan*, 6(Teori Kinrja), 67-94.
- Kompri. (2017). *Standardisasi Kompetensi Kepala Sekolah: Pendekatan Teori Untuk Praktik Profesional*. Kencana.
- Mulyasa, E. (2005). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, Implementasi*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. (2016). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Ar-Ruzz Media.
- Qomar, M. (2007). *Manajemen Pendidikan Islam*. Erlangga.
- Sagala, S. (2010). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Alfabeta.
- Sulistiyorini. (2006). *Manajemen Pendidikan Islam*. Elkaf.
- Syafaruddin. (2005). *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. PT. Ciptat Press.
- Usman, J. (2016). Urgensi Manajemen Pembiayaan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 219. <https://doi.org/10.19105/tadris.v11i2.1170>
- Wijaya, D. (2009). Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah. *Jakarta: Jurnal Pendidikan Penabur*, 13, 82-83.